



Diimplementasikan oleh:



Bekerja sama dengan:



P O L I C Y B R I E F

PDB Hijau - Akun Satelit Kehutanan untuk Mengukur Kinerja Ekonomi



P O L I C Y B R I E F

PDB Hijau - Akun Satelit Kehutanan untuk Mengukur Kinerja Ekonomi

Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

Kerja sama dengan:

Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penulis:

Christopher Eichhorn

Kontributor:

1. Edi Sulisty Heri Susetyo, S. Hut., M.Si.
(Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
2. Georg Buchholz (Direktur FORCLIME)
3. Wandojo Siswanto (Senior Adviser, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim)
4. Mohammad Rayan (Adviser, Lintas Bidang dan Manajemen Konflik)

Foto:

Koleksi FORCLIME, Sampul depan: Lanskap hutan Papua.—Georg Buchholz

Dicetak dan Didistribusi oleh:

FORCLIME

Jakarta, Maret 2023

Forests and Climate Change (FORCLIME)

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Penafian:

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak selalu menggambarkan kebijakan resmi atau posisi GIZ atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Daftar Isi

Pendahuluan	3
Metodologi	4
Hasil dan Diskusi	5
Kesimpulan	6
Rekomendasi Kebijakan	7
Referensi	7



Rawa Biru, Taman Nasional Wasur.—Courtesy Taman Nasional Wasur

Pendahuluan

Hutan memiliki sumber daya berupa barang dan jasa yang bermanfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perhitungan nilai dari sumber daya hutan dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sulit untuk dilakukan. Selain pemanfaatan kayu, hutan menyediakan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa ekosistem yang saat ini belum sepenuhnya diperhitungkan atau diperdagangkan di pasar. Akibatnya, kontribusi relatif sektor kehutanan Indonesia terhadap PDB nasional terbilang kecil.

Di masa lalu, sektor kehutanan berkontribusi lebih besar pada perekonomian karena tingginya pemanfaatan kayu. Belakangan, aktivitas di sektor kehutanan diperketat, dan sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) relatif lebih didorong. Pada tahun 1993 sektor kehutanan menyumbang 4,3% terhadap PDB nasional, namun pada tahun 2002 hanya 2,3%, dan pada tahun 2020 semakin menurun menjadi 0,7%. Rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional juga memicu beberapa diskusi nasional mengenai penyebab situasi ini, mengingat sumber daya hutan Indonesia sangat luas¹.

Hal ini menjadi penting bagi pendanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia, karena salah satu variabel alokasi anggaran kementerian dihitung berdasarkan kontribusinya terhadap PDB nasional.

Pada tahun 2021, FORCLIME mendukung KLHK dalam mengembangkan metodologi baru dalam penghitungan kontribusi terhadap PDB nasional berdasarkan akun satelit agar dapat lebih mencerminkan kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional. Neraca satelit adalah statistik tambahan yang terkait dengan sistem neraca nasional (*System of National Accounts - SNA*) yang memungkinkan analisis aspek ekonomi tertentu seperti pariwisata, budaya, atau lingkungan. Neraca satelit digunakan untuk memeriksa kepentingan ekonomi dari berbagai subsektor ekonomi dan seringkali juga distribusi spasialnya. Untuk perhitungannya, semua transaksi ekonomi terkait dibuat secara eksplisit terlihat sesuai dengan standar akuntansi dan definisi SNA. Oleh karena itu, neraca satelit bersifat lebih detil daripada statistik SNA, yang menurut aturan yang disepakati secara internasional, mengumpulkan ukuran aktivitas ekonomi seperti PDB. Di Indonesia juga telah disusun neraca satelit untuk PDB pariwisata, PDB maritim, dan ekonomi kreatif.

¹ Sri Mulyani: Indonesia Contains Forests and Fisheries, but The Contribution Is Almost Non-Existent - Kompas.com

Metodologi

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab atas penghitungan PDB nasional, dengan menggunakan “pendekatan nilai tambah”. Nilai tambah yang diciptakan oleh sektor kehutanan adalah selisih antara nilai *output* dan barang atau jasa hutan antara. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia dibagi menjadi sembilan sektor bisnis di mana kehutanan termasuk dalam sektor “Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan”. Namun, dalam angka PDB saat ini, subsektor kehutanan hanya mencakup kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan produksi kayu dan HHBK. Ini berarti bahwa sistem saat ini tidak sepenuhnya memperhitungkan semua kegiatan binaan KLHK yang menciptakan nilai tambah.

Kolaborasi KLHK bersama BPS yang didukung oleh FORCLIME bertujuan untuk melengkapi penghitungan kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDB nasional agar dapat memperhitungkan seluruh kegiatan dari hulu ke hilir dengan lebih baik. Untuk tujuan tersebut, PDB *Satelit Kehutanan* (2015-2020) dihitung dari 89 kegiatan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). PDB *Satelit Kehutanan* memperhitungkan lebih banyak kegiatan yang terdaftar dalam KBLI, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan produksi kayu dan HHBK, industri pengelolaan hasil hutan, dan perdagangan hasil hutan, dan ekowisata (lihat **Gambar 1**). Penyusunan PDB *Satelit Kehutanan* menggunakan metodologi yang menyerupai perhitungan PDB konvensional, namun ditambahkan

dengan memasukkan subkategori pendapatan negara yang termasuk dalam binaan KLHK yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam PDB Subsektor Kehutanan. PDB *Satelit Kehutanan* didasarkan pada data yang dapat dikumpulkan oleh BPS setiap tahunnya. Alur kerja untuk menghasilkan PDB subsektor kehutanan (lihat **Gambar 2**) dimulai dengan mengumpulkan data produksi, harga, dan biaya per komoditas hutan. Kemudian, tiga proses perhitungan dilakukan: (1) Nilai tambah bruto subsektor kehutanan (2) Nilai tambah bruto industri berbasis kehutanan, dan (3) Nilai tambah bruto perdagangan produk kehutanan. Sebagai langkah terakhir, PDB *Satelit Kehutanan* dari KLHK diperiksa konsistensinya dengan data yang telah dikompilasi oleh BPS.



Gambar 1: Kesesuaian PDB Kehutanan dengan PDB Nasional



Gambar 2: Alur Kerja Penyusunan PDB Subsektor Kehutanan



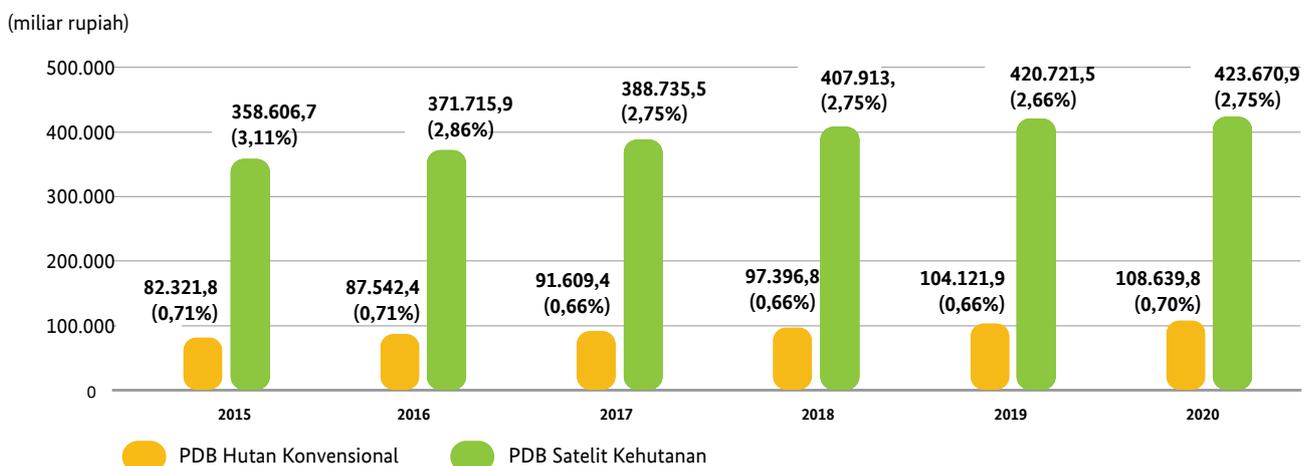
Hasil dan Diskusi

PDB Satelit Kehutanan 2015-2020 yang lebih komprehensif menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional atas dasar harga berlaku bernilai sekitar empat kali lebih tinggi daripada yang diasumsikan sebelumnya dengan metodologi penghitungan konvensional. Secara relatif, sektor kehutanan berkontribusi rata-rata 2,85% terhadap PDB nasional antara tahun 2015 dan 2020. Ini berarti metode konvensional mengabaikan lebih dari 2% peran sektor kehutanan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa provinsi yang paling banyak berkontribusi terhadap PDB kehutanan nasional pada tahun 2019 dan 2020 adalah Riau dan Jawa Timur.

Menurut metodologi PDB Satelit Kehutanan 2015-2020, pada tahun 2020 subsektor kehutanan menyumbang 2,75% terhadap PDB Indonesia (lihat Gambar 3). Namun perlu

dicatat bahwa angka ini masih belum memperhitungkan kontribusi riil hutan terhadap kesejahteraan nasional negara, karena (1) metodologi ini hanya mencakup kegiatan hutan konvensional seperti produksi kayu bulat, industri berbasis hutan dan perdagangan hasil hutan dalam perhitungannya dan (2) metode ini hanya mengukur transaksi ekonomi (yaitu arus transaksi barang dan jasa), karena metodologi akuntansi yang digunakan mengikuti aturan SNA. Ruang lingkup perhitungan ini masih belum memperhitungkan berbagai jasa ekosistem seperti pengaturan iklim dan air, juga penggunaan sumber daya alam lainnya yang menopang jutaan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan. Semua jasa ini saat ini tidak sepenuhnya diperhitungkan sebagai kegiatan ekonomi dalam neraca nasional. Sebagai contoh, penyerapan karbon tidak dimasukkan karena tidak terdaftar sebagai kegiatan ekonomi dalam KBLI. PDB Satelit Kehutanan 2015-2020 telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal KLHK melalui keputusan SK.28/SETJEN/DATIN/DTN.O/4/2022.

Gambar 3: Perbandingan antara PDB Hutan Konvensional dan PDB Satelit Kehutanan 2015-2020 di Indonesia



Kesimpulan

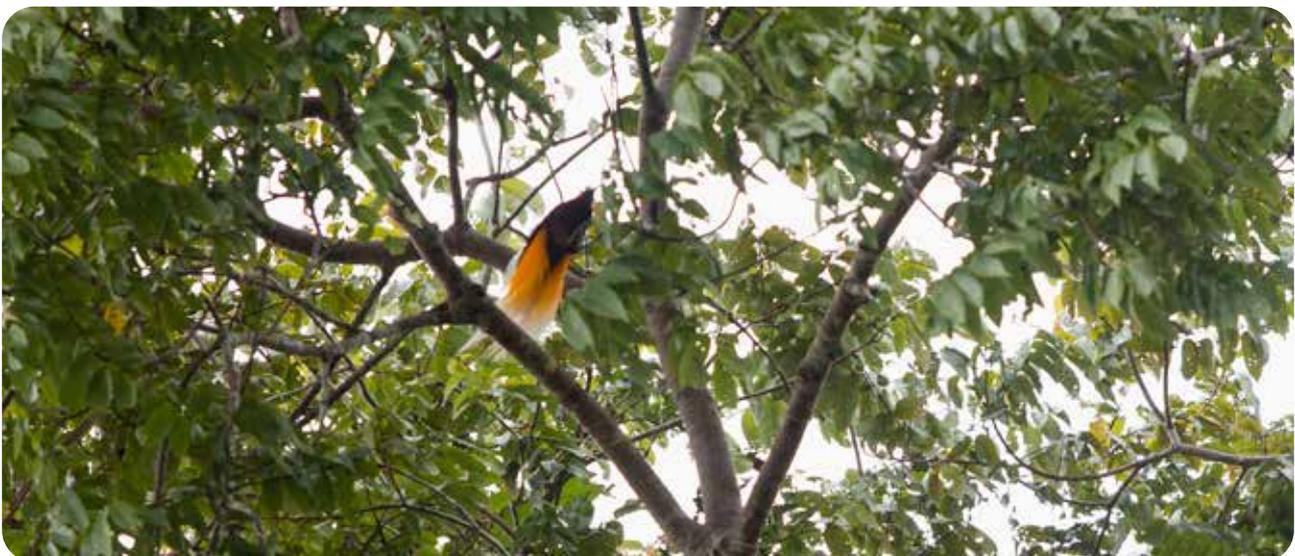
Metodologi penghitungan PDB melalui pendekatan satelit kehutanan yang dilakukan oleh KLHK bekerja sama dengan BPS dan didukung oleh FORCLIME menunjukkan bahwa peran hutan bagi perekonomian nasional belum begitu diperhitungkan dalam perhitungan PDB konvensional. Melalui elaborasi metodologi nasional dengan melengkapinya dengan PDB Satelit Kehutanan, persentase kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDB nasional bertambah hingga empat kali lipat.

Jika kegiatan kehutanan diperhitungkan secara lebih komprehensif, kontribusi subsektor kehutanan meningkat dari 0,70% menjadi 2,75% pada tahun 2020.

Hal ini disebabkan oleh integrasi kontribusi tambahan dari industri berbasis kehutanan (1,37%), perdagangan produk kehutanan (0,64%), dan pajak neto atas produk kehutanan dan bisnis berbasis kehutanan (0,03%) terhadap PDB nasional. Perhitungan serangkaian jasa ekosistem yang lebih luas tetap sulit untuk dilakukan dan belum ada metode pasti untuk penghitungannya. Penghitungan PDB Satelit Kehutanan merupakan pendekatan untuk lebih mencerminkan kontribusi hutan sebenarnya terhadap PDB nasional dan dapat berfungsi sebagai referensi tambahan bagi KLHK untuk mengamati relevansi ekonomi dari sektor kehutanan. KLHK didukung oleh FORCLIME akan melanjutkan upaya mereka untuk melakukan penghitungan riil PDB kehutanan di Indonesia.



Kiri Atas: Air Terjun Loto di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah - objek wisata ekowisata yang menciptakan peluang pendapatan daerah.—Fikty Apriliani. **Kanan atas:** Pengolahan sagu (*Metroxylon sagu*) di Papua - makanan pokok dari Indonesia bagian timur. **Bawah:** Pengamatan burung di kampung Rheapang Muaif, Papua—Zulkifli-NGI.



Rekomendasi Kebijakan

Untuk memfasilitasi kontribusi sektor kehutanan yang lebih tinggi bagi kesejahteraan bangsa yang tercermin dari PDB, penting untuk menerapkan multi-usaha kehutanan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan ini memungkinkan pemegang Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk juga menggunakan sumber daya hutan selain kayu di dalam batas-batas konsesi mereka, sehingga menciptakan lebih banyak nilai tambah. Namun, perlu dicatat bahwa pemegang izin diwajibkan untuk melibatkan masyarakat setempat yang bergantung pada hutan yang mungkin tinggal di dalam kawasan dalam pengembangan multi-bisnis kehutanan. Pendekatan baru ini diharapkan dapat memfasilitasi akses pasar bagi masyarakat lokal terkait hasil hutan dan bukan mengecualikan mereka dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Penerbitan izin perhutanan sosial perlu dipercepat, masyarakat setempat dibantu dan diperkuat kapasitasnya di bawah pengawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang bertanggung jawab. Ada enam izin perhutanan sosial yang berbeda (hutan desa, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, kemitraan konservasi dan hutan adat), yang memberikan hak kepada masyarakat lokal untuk mengkomersialkan hasil hutan non-kayu atau untuk mempromosikan ekowisata dalam batas-batas izin mereka. Dorongan kegiatan berbasis hutan tersebut akan menambah kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDB nasional.

Sejauh ini, PDB Satelit Kehutanan masih belum memperhitungkan semua jasa ekosistem yang disediakan oleh hutan. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menggunakan dan terus meningkatkan perhitungan PDB Satelit Kehutanan selain penghitungan PDB nasional untuk lebih mencerminkan kontribusi riil hutan terhadap perekonomian nasional. PDB Satelit Kehutanan perlu diperluas cakupannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama terkait jasa ekosistem dan hasil hutan

bukan kayu. Hal ini dapat dicapai baik melalui akuntansi yang lebih komprehensif untuk kegiatan yang sudah terdaftar di KBLI maupun melalui pembentukan kategori KBLI baru untuk kegiatan terkait hutan yang saat ini belum terdaftar di KBLI.

Untuk melembagakan metodologi baru, penyusunan akun satelit PDB Satelit Kehutanan di bawah arahan KLHK perlu diperkuat dan diformalkan dalam bentuk keputusan presiden. Karena sektor kehutanan memiliki banyak keterkaitan dengan sektor ekonomi yang berdekatan, PDB Satelit Kehutanan harus dihitung setiap tahun untuk menilai kontribusi riil sektor tersebut terhadap PDB nasional.



Referensi

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: SK.28/SETJEN/DATIN/DTN.O/4/2022

PDB Satelit Kehutanan 2020. Pusat Data dan Informasi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pusat Statistik; Prof. Dr. Dodik Ridho Nurrochmat (2021)

Kompas.com, 28 Juni 2022. Sri Mulyani: Indonesia Isinya Hutan sama Perikanan, tapi Kontribusinya Hampir Tak Ada ([LINK](#))

